

DAFTAR PUSTAKA

- Angeline, D., & Hermawan, A. A. (2022). Analisis Usulan Strategi dalam merespon PMK 48/2023: Studi Kasus pada Perusahaan Perhiasan Emas.
- Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2023). Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-27.
- Assa J. R., Kalangi L., Pontoh W., Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 516-522.
- Bappebti. (2019). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia.
- DDTC News. (2020). Pajak menurut Edwin R.A. Seligman dalam Berbagai Definisi Pajak Simak di sini. Retrieved May 1, 2025, from DDTC News website: <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1811486/apa-itu-pajak-atas-konsumsi>
- DDTC News. (2023). PMK 48/2023: Emas Digital Tidak Dikenai Pajak, Ini Ketentuannya. Retrieved May 1, 2025, from DDTC News website: <https://news.ddtc.co.id>
- Dewi, H. K. (2024). Beli, Jual dan Tarik Fisik Emas Digital di Bareksa Emas Bebas Pajak, Ini Aturannya. Retrieved May 1, 2025, from Bareksa website: <https://www.bareksa.com/berita/emas/2024-01-23/beli-jual-dan-tarik-fisik-emas-digital-di-bareksa-emas-bebas-pajak-ini-aturannya>
- DJP. (2023). *Tanya Jawab PMK Nomor 48 Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fitriya. (2025). Panduan Dasar Pengenaan Pajak Emas Batangan dan Perhiasan. Retrieved May 1, 2025, from Klik Pajak website: <https://klikpajak.id/blog/dasar-pengenaan-pajak-ppn/>
- Kemenkeu RI. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu RI. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu RI. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2023 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Emas*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (2021). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wafikhoh, I. S. (2022). Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen. *Jurist-Diction*, 5(2).